



RENCANA KERJA

2021



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, sehingga “Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat tersusun, dengan harapan pada Tahun 2021 Masyarakat Lampung bersih dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Lainnya.

Rencana Kerja yang disusun oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung adalah merupakan tindak lanjut dari Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika serta Bahan Berbahaya Lainnya Tahun 2020–2024 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 2020-2024.

Berkenaan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung tahun 2021 yang merupakan paparan secara rinci dan detail tentang pelaksanaan tugas



Pencegahan, Pemberantasan atas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika serta Bahan Berbahaya Lainnya (P4GN) di wilayah Provinsi Lampung dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja ini memuat garis-garis besar tentang “Target Aksi” kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang mengerucut pada tujuan dan sasaran secara bertahap dan terarah, Sistematis, Terpadu dan Berkesinambungan, Terorganisir serta Komprehensif dengan harapan dapat mewujudkan “Lampung Bebas Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Lainnya” yang pada akhirnya menjadikan Masyarakat Lampung imun dan pulih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika serta Bahan Berbahaya Lainnya dan aman dari peredaran gelap Narkotika Psikotropika serta Bahan Berbahaya Lainnya sehingga tercapailah kelangsungan pelaksanaan Pembangunan Bangsa dan Negara menuju Masyarakat Adil dan Makmur.

Bandar Lampung, Januari 2021
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG

Drs. JAFRIEDI, M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI



DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Visi Misi 8

1.4 Maksud dan Tujuan 11

1.4 Sasaran Strategis 12

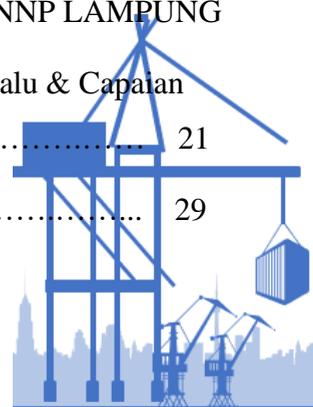
1.5 Permasalahan dan Tantangan 18

1.6 Sistematika Penyusunan 19

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BNNP LAMPUNG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian
Renstra BNNP 21

2.2 Prestasi kerja BNNP Lampung..... 29



| | | |
|-----|--|----|
| 2.3 | Hambatan dan Kendala Kerja BNN Provinsi Lampung..... | 30 |
|-----|--|----|

| | | |
|----------|--------------------------------------|----|
| BAB III. | PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021..... | 33 |
|----------|--------------------------------------|----|

| | | |
|-----|-----------------------|----|
| 3.1 | Sasaran Kegiatan..... | 33 |
|-----|-----------------------|----|

| | | |
|-----|----------------------------|----|
| 3.2 | Program dan Kegiatan | 36 |
|-----|----------------------------|----|

| | | |
|-----|-----------------------------------|----|
| 3.3 | Rencana Kegiatan Tahun 2021 | 42 |
|-----|-----------------------------------|----|

| | | |
|-----|-----------------------------------|----|
| 3.4 | Rencana Penyerapan Anggaran | 55 |
|-----|-----------------------------------|----|

| | | |
|---------|---------------|----|
| BAB IV. | Penutup | 61 |
|---------|---------------|----|



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Permasalahan narkotika merupakan satu diantara permasalahan global yang selalu menjadi perhatian serius bagi negara-negara di seluruh dunia. Mengingat kondisinya yang sampai saat ini belum mampu ditangani dengan baik dan cenderung mengalami peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius, terorganisir, dan bersifat lintas negara yang dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian sangat besar, terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, dan keamanan. Bahkan kejahatan ini dapat menyebabkan hilangnya generasi bangsa (*lost generation*), cikal bakal generasi penerus suatu bangsa.

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik alamiah atau sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri atau yang berkhasiat psikoaktif serta menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya bila digunakan tanpa pengawasan dokter digunakan secara berlebihan dan berulang kali



serta terus-menerus, bahan tersebut akan menimbulkan ketergantungan yang akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani

“Darurat Narkoba” merupakan kata yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kata “Darurat Narkoba” merupakan kata yang menyatakan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis dalam menangani banyaknya kasus-kasus narkoba. Tidak heran apabila saat ini pemerintah sedang gencar gencarnya menerapkan vonis hukuman mati kepada para pengedar narkoba. Hal tersebut dipicu karena banyaknya korban yang berjatuhannya dikarenakan narkoba. Menurut data yang didapatkan oleh BNN mencatat sekitar 3,4 juta warga Indonesia menggunakan narkoba pada tahun 2019.

Dengan luas perairan mencapai 8.800.000 kilometerpersegi dan perairan terluar 95.000 km, Indonesia sangat potensial bagi masuknya jaringan narkoba internasional. Di sinilah pentingnya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Indonesia dari sebuana jaringan narkoba internasional. Karena, makna kedaulatan maritim saat ini tidak saja terletak pada sejauh mana mampu menjaga teritorial Indonesia dari ancaman negara asing, melainkan juga mampu menjaga Indonesia agar tidak diobok-obok oleh sindikat narkoba internasional.



Disamping itu, pembangunan infrastruktur yang lamban di daerah terluar Indonesia membuat celah yang begitu menganga, sehingga gampang dimanfaatkan para kartel narkoba sebagai jalan masuk ke Indonesia. Banyaknya 'jalur tikus' dan medan terjal di daerah perbatasan, justru dimanfaatkan untuk menyelundupkan barang haram tersebut ke wilayah Indonesia

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Sasaran pembangunan nasional penanganan permasalahan narkoba pada tahun 2021 difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan



narkoba dengan indikator keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Adapun arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (*demand side*); meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*); dan meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*). Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah melalui pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN) di daerah; diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi; rehabilitasi pada korban penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba; dan pelaksanaan kegiatan intelijen narkoba.

Upaya Badan Narkotika Nasional menyelamatkan bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN) terus dilakukan. Penyalahguna dapat dicegah agar jumlahnya tidak bertambah, mereka juga dapat direhabilitasi agar permintaan narkoba menurun, ditambah dengan upaya penindakan terhadap para pengedar secara agresif dan



berharap berdampak pada penurunan supply (peredaran) di Indonesia.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional penanganan permasalahan Narkoba 2020-2024 dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan, maka ditetapkan arah kebijakan BNN periode 2020-2024 sebagai berikut :

1. Penanganan permasalahan Narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
2. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral dan berkelanjutan.
3. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan Narkoba.

Strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan:

1. Mengekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat.



2. Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba (P4GN).
3. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika.
5. Menjalin kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai komponen baik dalam maupun luar negeri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN.
6. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan BNNP.

Capaian kegiatan P4GN tidak lepas dari kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah, organisasi kemasyarakatan, kalangan dunia usaha dan seluruh lapisan masyarakat yang telah berkomitmen dan berkontribusi dalam mendukung upaya menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung tahun 2021 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988* (Konvensi Persedikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988);
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;



7. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2015–2019.
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) tahun 2020-2024.

1.3 VISI dan Misi

VISI

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi BNN Provinsi Lampung pada masa yang akan datang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, BNNP Lampung sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Lampung harus memiliki standar yang ditetapkan.

Sesuai dengan peran dan kewenangan tersebut, BNNP Lampung harus memberikan kontribusi yang signifikan



dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, mengingat tugas tersebut juga dilaksanakan oleh instansi lain. Adapun visi BNNP Lampung periode 2020-2024 adalah: “Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”

Uraian Visi:

1. **Profesional;** bahwa untuk mencapai sukses dalam penanganan permasalahan narkotika, seluruh pegawai BNN harus mampu bersikap profesional. Profesional bukan hanya sebatas memiliki keahlian, melainkan juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Seorang yang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.
2. **Tangguh;** bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab penanganan permasalahan narkotika seluruh pegawai BNN harus memiliki semangat atau



spirit perjuangan yang pantang menyerah, sulit dikalahkan, kuat, dan handal. BNN harus memiliki pegawai dengan mentalitas yang kuat, teguh pada pendirian dari berbagai pengaruh buruk pihak manapun, tabah dan tahan (termasuk menderita) dalam menghadapi segala rintangan pelaksanaan tugas, serta sebagai seorang pejuang yang ulet.

3. **Terpercaya;** bahwa dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, BNN berlandaskan pada ketentuan, standar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil dari seluruh pekerjaan yang dilaksanakan dapat diterima dan dipercaya oleh para shareholder. Keterpercayaan inilah yang akan selalu dijaga oleh BNN untuk menjadi kekuatan penggerak seluruh elemen dalam upaya penanganan permasalahan narkotika secara bersama-sama.

MISI

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan misi BNNP Lampung sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan



2. Mengoptimalkan sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif.
4. Memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional

1.4 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung dalam kurun waktu satu tahun yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan- perubahannya

B. Tujuan

- Untuk Melindungi dan menyelamatkan Komponen Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa dan pegawai Negeri dan Swasta di Provinsi Lampung dari Ancaman Narkoba tercemin dari terkendalnya prepalensi angka Penyalahgunaan Narkoba 0,05% pertahun.



- Berhasil menekan angka prevalensi tidak lebih tinggi dari angka yang ditetapkan BNN yaitu 0,05% pertahun.

1.5 Sasaran strategis

Sasaran Strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung berdasarkan RENSTRA BNN 2020 - 2024, adalah sebagai berikut:

A. BAGIAN UMUM

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja |
|---|--|--|
| B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN | <ol style="list-style-type: none">1. Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)2. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi3. Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN |
| C. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNN. |
| D. Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber | Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan | <ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian |

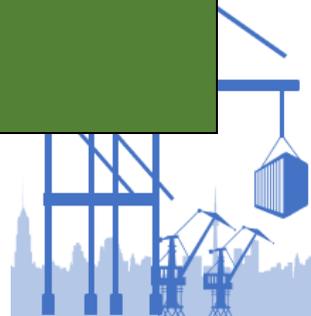


| Daya Manusia | tatalaksana yang efektif | 2. Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana |
|--|--|--|
| E. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur fungsi layanan | 1. Nilai kualitas laporan keuangan Satuan kerja 2. Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai |
| F. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Meningkatnya Pelayanan umum secara maksimal. | 1. Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan 2. Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa |
| G. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | Meningkatnya publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal. | 1. Indeks Layanan Kehumasan 2. Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran |



B. BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja |
|---|--|---|
| A. Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Indeks |
| B. Penyelenggaraan Advokasi | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba |
| C. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Indeks Kemandirian Partisipasi |



| | | |
|---|--|---|
| D. Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan | Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada" |
|---|--|---|

C. BIDANG REHABILITASI

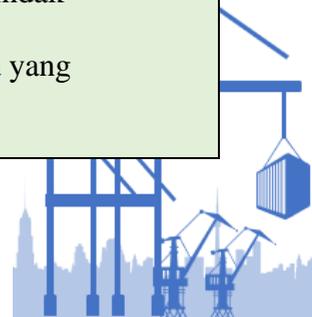
| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja |
|---|---|--|
| A. Pengembangan fasilitas rehabilitasi | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba | 1. Jumlah Lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar 2. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi berbasis Masyarakat |
| B. Peningkatan kemampuan tenaga rehabilitasi | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi | Jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi |



| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| C. Layanan rehabilitasi berkelanjutan | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika | <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih2. Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika |
|---------------------------------------|--|--|

D. BIDANG PEMBERANTASAN

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja |
|--|--|--|
| A. Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi | Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan | Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan |
| B. Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 |

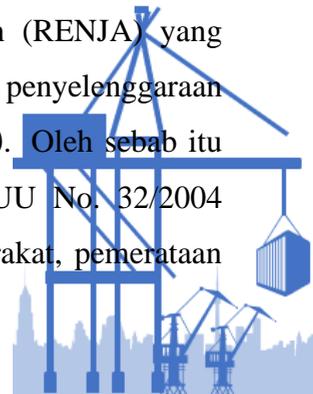


| | | |
|--|--|---|
| C. Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika | Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan Kesehatan tahanan Nilai tingkat Keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika |
|--|--|---|

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung selain melaksanakan Tugas dan Fungsinya, juga menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

1. Mengkoordinasikan program kegiatan P4GN Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan BNNK;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas BNNK;

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Kerja yang dikenal dengan (RENJA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan



dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Kerja BNNP Tahun 2021 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan visi dan Misi BNN. Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) 2021 ini merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi BNNP Lampung tahun 2021.

1.6. Permasalahan dan Tantangan Utama

Dari uraian kondisi umum di atas munculah permasalahan sebagai berikut:

1. tingginya angka penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya.
2. tingginya kasus peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya.
3. tingginya jumlah tersangka kasus narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya.
4. kurangnya pemahaman masyarakat serta penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya.
5. belum optimalnya peran serta masyarakat terutama dunia usaha dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan



Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (P4GN).

1.7. Sistematika Penyusunan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Visi dan Misi

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sasaran Strategis

1.6 Permasalahan dan Tantangan

1.7 Sistematika Penyusunan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BNNP LAMPUNG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan
Capaian Renstra Badan Narkotika Nasional Provinsi

2.4 Review Terhadap Rancangan Badan Narkotika
Nasional Provinsi Lampung

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi



Lampung

3.3 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja BNNP Lampung

3.4 Program Dan Kegiatan



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Tahun 2020

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Tahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp 9.785.181.000 namun dalam perjalanannya, BNNP Lampung mendapatkan perintah untuk melakukan refocusing anggaran satker sebesar 541.842.000, kemudian mendapatkan penambahan anggaran dari BNN RI untuk program PNBP senilai Rp. 8.700.000 dan penambahan anggaran kembali sebesar 189.150.000, penambahan pagu gaji senilai Rp. 160.842.000 sehingga keseluruhan anggaran BNNP Lampung pada Tahun Anggaran 2020 adalah senilai : Rp. 9.602.031.000. Pada tahun 2020 BNNP Lampung juga mendapatkan anggaran Hibah dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 2.000.000.0000 sehingga pada akhir tahun total anggaran BNNP Lampung sebesar 11.602.031.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.176.775.528 atau **(96,33%)**, dengan rincian sebagai berikut:

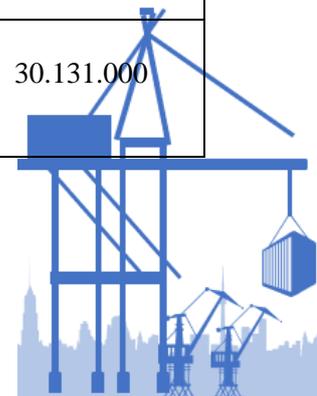


#hidup100persen

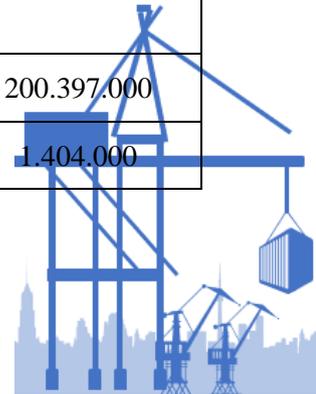
Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia



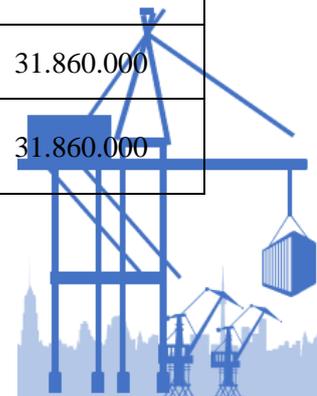
| No | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Tahun 2020 | | | |
|----|---------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Vol | Satuan | Pagu | Realisasi |
| 1 | 066.01.01 | Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN | | | 6.992.293.000 | 6.686.838.463 |
| 2 | 3236 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | | | 4.167.855.000 | 3.935.270.833 |
| 3 | 3236.955 | Layanan Manajemen Keuangan | 1 | Layanan | 7.368.000 | 7.347.103 |
| 4 | 3236.994 | Layanan Perkantoran | 1 | Bulan Layanan | 4.160.487.000 | 3.927.923.730 |
| 5 | 3237 | Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | | | 32.740.000 | 30.131.000 |



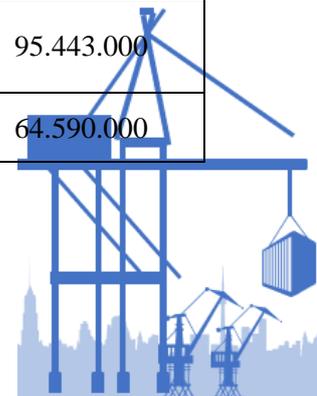
| | | | | | | |
|----|----------|---|---|---------|---------------|-------------|
| 6 | 3237.954 | Layanan Manajemen SDM | 1 | Layanan | 32.740.000 | 30.131.000 |
| 7 | 3238 | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | | | 37.497.000 | 33.769.342 |
| 8 | 3238.952 | Layanan Perencanaan | 1 | Layanan | 1.249.000 | 600.000 |
| 9 | 3238.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 1 | Layanan | 36.248.000 | 33169342 |
| 10 | 3239 | Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana | | | 2.725.611.000 | 2659077288 |
| 12 | 3239.951 | Layanan Sarana Prasarana Internal | 1 | Layanan | 200.867.000 | 200.397.000 |
| | 3239.956 | Layanan Manajemen BMN | 1 | Layanan | 1.404.000 | 1.404.000 |



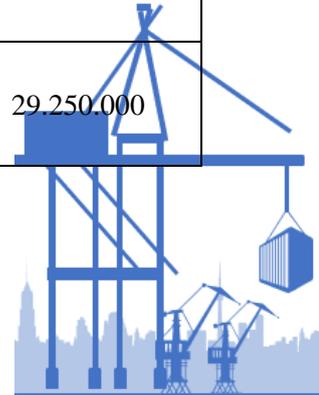
| | | | | | | |
|----|------------------|---|---|----------|----------------------|----------------------|
| 13 | 3239.962 | Layanan Umum | 1 | Layanan | 112.000.000 | 100.881.935 |
| 14 | 3239.994 | Layanan Perkantoran | 1 | Layanan | 2.411.340.000 | 2.356.394.353 |
| | 3979 | Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | | | 28.590.000 | 28.590.000 |
| | 3979.958 | Layanan Hubungan dan Keprotokolan | 1 | Layanan | 28.590.000 | 28.590.000 |
| 15 | 066.01.06 | Program pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | | | 4.609.738.000 | 3.165.036.821 |
| 16 | 3247 | Penyelenggaraan Advokasi | | | 31.948.000 | 31.860.000 |
| 17 | 3247.001 | Advokasi Pembangunan berwawasan Anti Narkoba | 2 | Advokasi | 31.948.000 | 31.860.000 |



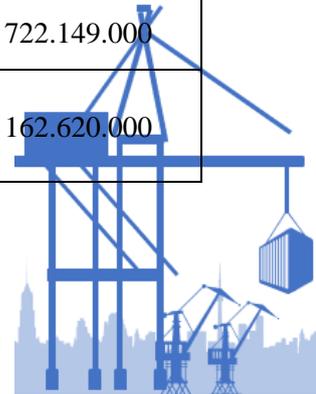
| | | | | | | |
|----|----------|---|----|--------------|-------------|-------------|
| 18 | 3248 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | | | 360.706.000 | 352.205.000 |
| 19 | 3248.001 | Program Pemberdayaan Anti Narkoba | 2 | Pemberdayaan | 360.706.000 | 352.205.000 |
| 22 | 3251 | Pelaksanaan Intelegen Berbasis Teknologi | | | 473.525.000 | 473.514.002 |
| 23 | 3251.001 | Laporan informasi tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika | 4 | Laporan | 473.525.000 | 473.514.002 |
| 24 | 3256 | Pasca rehabilitasi Penyalahguna dan atau pecandu Narkoba | | | 175.532.000 | 160.033.000 |
| 25 | 3256.001 | Fasilitas Layanan Pascarehabilitasi Narkoba | 20 | Orang | 99.532.000 | 95.443.000 |
| 26 | 3256.002 | Layanan Pascarehabilitasi | 80 | Orang | 76.000.000 | 64.590.000 |



| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------------------|-------------|-------------|
| 27 | 3257 | Pemberdayaan Peran serta masyarakat | | | 432.266.000 | 220.035.500 |
| 28 | 3257.001 | Program Pemberdayaan Anti narkoba | 4 | Program Pemberdayaan | 432.266.000 | 426.756.000 |
| 29 | 3257.001.001 | Layanan deteksi dini penyalahguna narkoba instansi pemerintah | | | 312.196.000 | 309.256.000 |
| 29 | 3257.001.002 | Program Pemberdayaan Pnggiat Anti Narkoba Di Dunia Usaha/Swasta | | | 30.085.000 | 30.085.000 |
| 29 | 3257.001.003 | Program Pemberdayaan Pnggiat Anti Narkoba Di Lingkungan Masyarakat | | | 58.850.000 | 58.165.000 |
| 29 | 3257.001.004 | Program Pemberdayaan Pnggiat Anti Narkoba Di Lingkungan Pendidikan | | | 31.135.000 | 29.250.000 |



| | | | | | | |
|----|----------|---|-----|-----------|---------------|---------------|
| 30 | 3258 | Pengawasan Tahanan dan barang bukti | | | 180.170.000 | 163.963.000 |
| 31 | 3258.001 | Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika dan Presursor Narkotika | 1 | Layanan | 180.170.000 | 163.963.000 |
| 32 | 3259 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | | | 1.047.581.000 | 1.018.904.063 |
| 33 | 3259.001 | Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Instansi Pemerintah | 6 | Fasilitas | 303.256.000 | 296.755.063 |
| 34 | 3259.002 | Paket pembiayaan layanan Rehabilitasi | 150 | Orang | 744.325.000 | 722.149.000 |
| 35 | 3260 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | | | 165.570.000 | 162.620.000 |



| | | | | | | |
|----|----------|--|----|-----------|---------------|---------------|
| 36 | 3260.001 | Fasilitas Rehabilitasi Narkoba Komponen Masyarakat | 3 | Fasilitas | 165.570.000 | 162.620.000 |
| 38 | 5354 | Penyelidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika | | | 1.201.540.000 | 1.169.382.000 |
| 39 | 5354.001 | Kasus tindak pidana narkotika | 10 | Kasus | 1.201.540.000 | 1.169.382.000 |
| 40 | 5936 | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | | | 540.900.000 | 530.700.000 |
| 41 | 5355.001 | Informasi P4GN | 30 | Informasi | 540.900.000 | 530.700.000 |



2.2 Prestasi kerja BNN Provinsi Lampung tahun 2020

a. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2019 Bidang P2M BNNP LAMPUNG berhasil melaksanakan KIE / Penyuluhan diseluruh wilayah Provinsi Lampung sebanyak 32.893 orang yang meliputi instansi pemerintah, swasta, Pendidikan dan masyarakat. Selain penyebaran informasi tetang narkoba melalui KIE/Penyuluhan, BNNP Lampung juga melakukan penyebaran informasi melalui media (konvensional, cetak, elektronik dan online) yang sudah menjangkau \pm **14.855** orang.

Pada tahun 2020 juga terdapat beberapa lembaga yang responsif terhadap penanganan permasalahan narkoba di Provinsi Lampung, antara lain adalah: LPP RRI Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Kemenag Kanwil Lampung, BKKBN Provinsi Lampung, UBL, ITERA, UIN Lampung, dan PT. KAI.

b. Bidang Rehabilitasi

Pecandu atau penyalahguna narkoba yang menjalani program rehabilitasi di lembaga rehabilitasi (BNN, Kemenkes dan Kemensos) di Provinsi Lampung sebanyak



1.629 orang dan sebagian besar tidak melanjutkan program pasca rehabilitasi di BNN Provinsi Lampung.

c. Bidang Pemberantasan

Selama tahun 2020 BNN Provinsi Lampung berhasil melakukan pengungkapan 9 (sembilan) kasus narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 24 orang.

Barang bukti yang berhasil disita selama tahun 2020 adalah:
Shabu : 27.878,21 gr, Ekstasi : 15.935 Butir dan Ganja :210.392,38 gr.

1.3 Hambatan dan Kendala Kerja BNN Provinsi Lampung tahun 2020

a. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelatihan Lifeskill bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkotika Wilayah Perkotaan adalah kesulitan memasarkan hasil produk yang dibuat oleh peserta yang telah dilatih.
- Tidak adanya permintaan deteksi dini narkotika melalui Test Urine dari kelompok swasta dan masyarakat, sehingga deteksi dini narkotika banyak dilaksanakan di Instansi Pemerintah.



b. Bidang Rehabilitasi

- Ketidaktahuan masyarakat mengenai fasilitas rehabilitasi milik Instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi rawat jalan medis
- Masyarakat masih takut untuk melaporkan diri ke fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah
- Kurangnya sosialisasi mengenai lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang membuka layanan rehabilitasi rawat jalan
- Ada beberapa Pasien lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang tidak rutin menjalankan proses rawat jalannya (drop Out) dan Klien tidak melanjutkan konseling sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Ada 4 (Empat) puskesmas Non IPWL yang SDM nya belum dilatih sebagai petugas asesmen dan konselor sehingga belum bisa memberikan layanan rehabilitasi rawat jalan terhadap penyalahguna/pecandu Narkoba
- Tidak terpenuhinya target layanan dikarenakan sempit terhentinya Klien yang dirujuk ke Rumah Damping dari Loka Kalianda karena sedang dilakukan pembenahan terhadap program yang ada di rumah Damping Kalianda.



- Kurangnya minat para penyalahguna narkoba yang telah menjalani program rehabilitasi untuk melanjutkan ke program pascarehabilitasi

c. Bidang Pemberantasan

Semakin berkembangnya modus operandi para bandar Narkoba dalam menyelundupkan narkoba ke wilayah Provinsi Lampung



BAB III

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2021

1.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung berdasarkan Tujuan dan Arah Kebijakan, antara lain :

A. PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

| SASARAN KEGIATAN | IKK | TARGET |
|--|---|-----------|
| Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | N/A |
| Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 50,03% |
| Terselenggaranya pembinaan Kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan | Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada" | 1 Kawasan |
| Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Indeks Kemandirian Partisipasi | 3,10 |



B. REHABILITASI

| SASARAN KEGIATAN | IKK | TARGET |
|---|--|-----------|
| Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | 1. Jumlah Lembaga rehabilitasi yang Memenuhi Standar | 6 Lembaga |
| | 7. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat | 100 % |
| Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi | 1. Jumlah petugas Lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi 2. Jumlah petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih | 6 Lembaga |
| Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika | 1. Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi | 2 Lembaga |
| | 2. Indeks kepuasan Layanan rehabilitasi narkotika | 100 Orang |

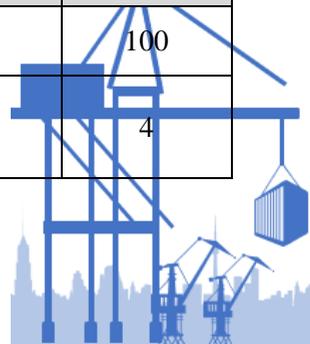


C. PEMBERANTASAN

| SASARAN KEGIATAN | IKK | TARGET |
|---|---|------------|
| 1. Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika | Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan | 4 Jaringan |
| 3. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika | 1. Jumlah berkas perkara tindak pidana precursor narkotika yang P-21 | 10 Berkas |
| 4. Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika | 1. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan | 100 |
| | 2. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika | 100 |

D. BAGIAN UMUM

| SASARAN KEGIATAN | IKU | TARGET |
|--|---|--------|
| 1. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | 1. Nilai kualitas Laporan keuangan satuan kerja | 100 |
| | 2. Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai | 4 |



| | | |
|--|---|-----|
| 2. Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif | 1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian | 3,1 |
| | 3. Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana | 74% |
| 3. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNN | 80 |
| 4. Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal. | 1. Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan | 3 |
| | 2. Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa | 3 |
| 5. Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal | 1. Indeks Layanan Kehumasan | 3 |
| | 2. Presentase tingkat kepuasan layanan keprotokoleran | 80% |

3.2. Program Dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung maka program-

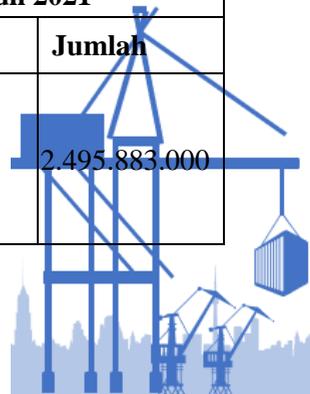


program yang dilaksanakan tahun anggaran 2021 adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

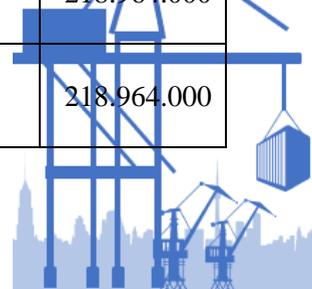
2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini menggunakan aplikasi ADIK (Arsitektur dan Informasi Kinerja) yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI 2021 dan semua kegiatannya berpanduan kepada Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan dan Standar Aktifitas BNN Tahun 2021. Adapun kegiatan BNNP Lampung Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

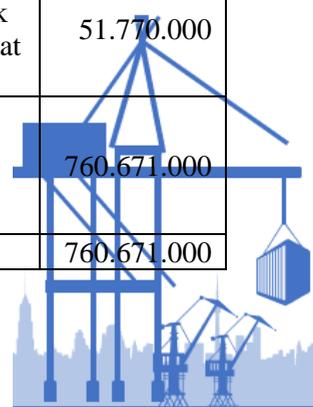
| No | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Tahun 2021 | | |
|----|---------------|---|------------|--------|---------------|
| | | | Vol | Satuan | Jumlah |
| 1 | 066.01.B L | Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran | | | 2.495.883.000 |



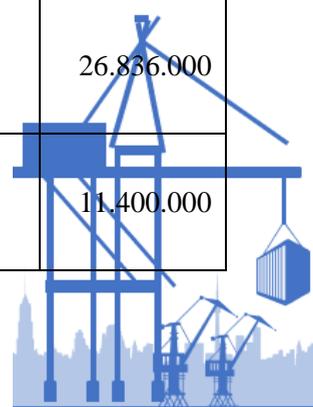
| | | | | | |
|----|----------|---|---|-----------------------|-------------|
| | | Gelap Narkoba (P4GN) | | | |
| 2 | 3247 | Penyelenggaraan Advokasi | | | 50.000.000 |
| 3 | 3247.BDE | Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga | 5 | Keluarga | 50.000.000 |
| 4 | 3248 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | | | 106.000.000 |
| 5 | 3248.BDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | 1 | Kelompok Masyarakat | 106.000.000 |
| 6 | 3251 | Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi | | | 300.000.000 |
| 7 | 3251.BKA | Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat | 6 | Laporan | 300.000.000 |
| 8 | 3256 | Pascarehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkoba | | | 54.930.000 |
| 9 | 3256.ABG | Kebijakan Bidang Kesehatan | 1 | Rekomendasi Kebijakan | 54.930.000 |
| 10 | 3257 | Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | | | 218.964.000 |
| 11 | 3257.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 4 | Lembaga | 218.964.000 |



| | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------------------|-------------|
| 12 | 3258 | Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | | | 202.145.000 |
| 13 | 3258.BIA | Pengawasan dan Pengendalian Produk | 2 | Produk | 41.500.000 |
| 14 | 3258.BIB | Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat | 10 | Orang | 160.645.000 |
| 15 | 3259 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | | | 189.453.000 |
| 16 | 3259.AD G | Standarisasi Profesi dan SDM | 5 | Orang | 16.470.000 |
| 17 | 3259.ADI | Sertifikasi Profesi dan SDM | 25 | Orang | 172.983.000 |
| 18 | 3260 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | | | 313.720.000 |
| 19 | 3260.BD B | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 5 | Lambaga | 261.950.000 |
| 20 | 3260.BD D | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | 1 | Kelompok Masyarakat | 51.770.000 |
| 21 | 5354 | Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika | | | 760.671.000 |
| 22 | 5354.BC | Perkara Hukum | 1 | Berkas | 760.671.000 |



| | | | | | |
|----|------------|---|----|---------|---------------|
| | A | Perseorangan | 0 | | |
| 23 | 5936 | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | | | 300.000.000 |
| 24 | 5936.QD B | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 1 | Lembaga | 300.000.000 |
| II | 066.01.W A | Program Dukungan Manajemen | | | 7.116.544.000 |
| 1 | 3236 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | | | 4.417.613.000 |
| 2 | 3236.EA A | Layanan Perkantoran | 1 | Layanan | 4.408.013.000 |
| 3 | 3236.EA C | Layanan Umum | 1 | Layanan | 9.600.000 |
| 4 | 3237 | Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | | | 55.025.000 |
| 5 | 3237.EAF | Layanan SDM | 54 | Orang | 55.025.000 |
| 6 | 3238 | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | | | 38.236.000 |
| 7 | 3238.EA B | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal | 1 | Layanan | 26.836.000 |
| 8 | 3238.EA L | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | 1 | Laporan | 11.400.000 |



| | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|---------------|
| 9 | 3239 | Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | | | 2.533.980.000 |
| 10 | 3239.EA A | Layanan Perkantoran | 1 | Layanan | 2.140.730.000 |
| 11 | 3239.EA C | Layanan Umum | 2 | Layanan | 186.750.000 |
| 12 | 3239.EA D | Layanan Sarana Internal | 10 | Unit | 91.500.000 |
| 13 | 3239.EA E | Layanan Prasarana Internal | 1 | Layanan | 115.000.000 |
| 14 | 3979 | Penyelenggaraa n Kehumasan dan Keprotokolan | | | 71.690.000 |
| 15 | 3279.EAI | Layanan Kehumasan dan Protokoler | 1 | Layanan | 71.690.000 |



IV. BAGIAN UMUM

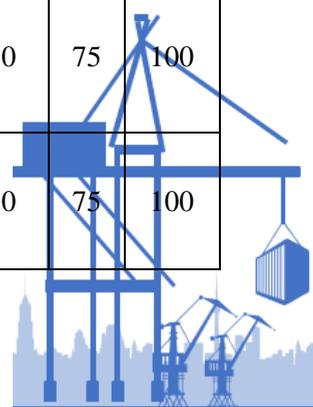
A. SUBBAG ADMINISTRASI

1. PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (3236)

| KODE | DESKRIPSI | VOL | PAGU | RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KET | | | | |
|------|--|-----|---------------|------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|--|---|---|---|--|---|--|--|---|
| | | | | JAN | | | | FEB | | | | MAR | | | | APR | | | | MEI | | | | JUN | | | | JUL | | | | AGUST | | | | SEPT | | | | OKT | | | | NOV | | | | DES | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 3236 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | | 4.408.013.000 | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | Dilaksanakan tiap bulan dengan rata-rata penyerapan Rp 300jt. PJ: Septi Rina Sari |
| 2 | Administrasi Kegiatan | 12 | 99.850.000 | | | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | √ | | | Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan. Dibayarkan per bulan dengan penyerapan Rp 8.320.000,- PJ: Febri Haryanti | | | | |
| 3 | Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke Kanwil | 2 | 300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | Kegiatan Rekon Laporan Tk. Wilayah yang dilakukan Per Semester. PJ: Sumardi | | | | |
| 4 | Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN | 12 | 1.800.000 | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | Kegiatan Rekon Bulanan, terkait laporan keuangan ke KPPN. PJ: Halley, Ismail | | | | | | | | |
| 5 | Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPKNL | 2 | 300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | Kegiatan Rekon Barang dilakukan Per Semester, dilakukan oleh tim Pengelola BMN | | | | |
| 6 | Rekonsiliasi Laporan PNPB ke KPPN | 12 | 1.800.000 | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | Kegiatan laporan PNPB test urine yang dilakukan bendahara penerimaan. PJ Sudrajat | | | | | | | | |
| 7 | Penyampaian SPM ke KPPN | 22 | 3.300.000 | | | | | | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | Penyampain SPM tiap bulan ke KPPN. PJ: Ismail | | | | | | | | |
| 8 | Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingakt UAKPA / UAPA-W | 12 | 12.600.000 | | | | | | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | √ | | | | Honorarium Pengelola UAKPA/UAPA-W setiap bulan | | | | | | | | |
| 9 | Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan | 1 | 3.120.000 | | √ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan rapat rekonsiliasi internal dan penelaahan penyusunan laporan keuangan un audited sem 2 TA. 2020 | | | | | | | | |
| 10 | Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Semester I | 1 | 3.200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | Pelaksanaan rapat rekonsiliasi internal dan penelaahan penyusunan laporan keuangan un audited sem 1 TA. 2021 | | | | |
| 11 | Penyusunan Laporan PNPB Semester I | 1 | 1.600.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | Lapooran penyusunan PNPB semseter 1 2021 | | | | |
| 12 | Penyusunan Laporan PNPB Semester II | 1 | 1.600.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | √ | | | | Lapooran penyusunan PNPB semseter 2 2021 | | | | |

3.4. RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN

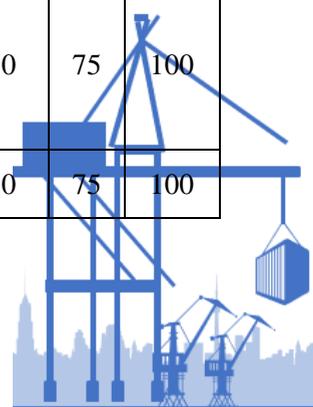
| No | Kegiatan | Anggaran | Rencana Penyerapan Per Triwulan | | | |
|----|--|---------------|---------------------------------|---------|----------|---------|
| | | | TW I % | TW II % | TW III % | TW IV % |
| 1 | Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | 2.495.883.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 2 | Penyelenggaraan Advokasi | 50.000.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 3 | Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga | 50.000.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 4 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | 106.000.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 5 | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | 106.000.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 6 | Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi | 300.000.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 7 | Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat | 300.000.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 8 | Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba | 54.930.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |



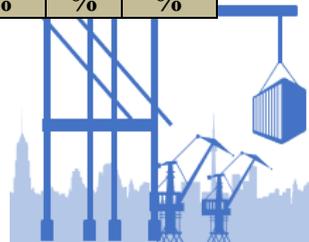
| | | | | | | |
|----|--|-------------|----|----|----|-----|
| 9 | Kebijakan Bidang Kesehatan | 54.930.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 10 | Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | 218.964.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 11 | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 218.964.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 12 | Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | 202.145.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 13 | Pengawasan dan Pengendalian Produk | 41.500.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 14 | Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat | 160.645.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 15 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | 189.453.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 16 | Standarisasi Profesi dan SDM | 16.470.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 17 | Sertifikasi Profesi dan SDM | 172.983.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 18 | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | 313.720.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 19 | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 261.950.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |



| | | | | | | |
|----|---|---------------|----|----|----|-----|
| 20 | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | 51.770.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 21 | Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika | 760.671.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 22 | Perkara Hukum Perseorangan | 760.671.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 23 | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | 300.000.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 24 | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 300.000.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| II | Program Dukungan Manajemen | 7.116.544.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 1 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | 4.417.613.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 2 | Layanan Perkantoran | 4.408.013.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 3 | Layanan Umum | 9.600.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 4 | Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | 55.025.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 5 | Layanan SDM | 55.025.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |



| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 6 | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | 38.236.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 7 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal | 26.836.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 8 | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal | 11.400.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 9 | Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | 2.533.980.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 10 | Layanan Perkantoran | 2.140.730.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 11 | Layanan Umum | 186.750.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 12 | Layanan Sarana Internal | 91.500.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 13 | Layanan Prasarana Internal | 115.000.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 14 | Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolatan | 71.690.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 15 | Layanan Kehumasan dan Protokoler | 71.690.000 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Jumlah | | | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |



BAB IV

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam mewujudkan Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Ruang lingkup perencanaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung ini dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Sosialisasi rencana kerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam Renja yang sudah dibuat;



3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh Badan Narkotika Nasional dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir Badan Narkotika Nasional. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Badan Narkotika Nasional.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Provinsi Lampung Bersih Narkoba. Aamiin.

Bandar Lampung, Januari 2021

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG**

Drs. JAFRIEDI, M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

